

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Green and Mitchel dalam Pradyani (2014) teori atribusi menjelaskan bahwa tindakan seorang pemimpin maupun orang-orang yang diberikan wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab. Fritz Heider (1958) berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan atau keberuntungan dalam pekerjaan. Hubungan Teori Atribusi dengan variabel pada penelitian ini dimana teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya yang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal yang akan mencerminkan perilaku kepemimpinan seseorang.

Teori Atribusi tidak terlepas dari perilaku seseorang didalam organisasi yaitu perilaku pemimpin dan perilaku bawahan. Kepemimpinan seperti cara berfikir, berperasaan, bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam pekerjaan di sebuah organisasi dengan bawahannya. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin atau orang-orang yang memberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab. Termasuk tindakan tidak etis maupun kecurangan akuntansi.

2.2 Variabel Y

2.2.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pengertian dari Kecurangan (fraud) dijabarkan pula oleh Theodorus (2010) yaitu merupakan berbagai tindakan yang melawan hukum. Kecurangan Akuntansi

(fraud) juga dipandang oleh Shuterland (1939) dalam Theodorus (2010) sebagai kejahatan kerah putih (white-collar crime). yaitu suatu tindakan pelanggaran hukum meliputi pemanfaatan kedudukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan, pengaruh, dan kepercayaan dalam lembaga-lembaga tertentu, namun telah disalahgunakan untuk keuntungan yang bersifat ilegal atau melakukan kegiatan ilegal demi kepentingan organisasi maupun pribadi. IAI tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Kecurangan Akuntansi merupakan kejahatan, namun sebaliknya Sutherland (1939) dalam Theodorus (2010) berpendapat bahwa Kecurangan Akuntansi sebagai kejahatan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Kecurangan Akuntansi (fraud) merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap aturan akuntansi yang berlaku dan dilakukan seseorang yang mempunyai jabatan atau kewenangan dalam suatu entitas untuk keuntungan pribadi maupun organisasi. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi menurut IAI adalah, salah saji atau penghilangan yang dilakukan secara disengaja terhadap pengungkapan laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pemakai laporan keuangan. Penyalahgunaan atau penggelapan aktiva perusahaan. Kejadian tersebut akan berkaitan pada, proses pembuatan laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2.2.2 Karakteristik Kecenderungan Kecurangan Kecurangan Akuntansi

Karakteristik utama yang menunjukkan adanya kecurangan akuntansi dilihat dari sudut pandang *Fraud* dan hukum (Tjahjono Dkk, 2013) :

1. Tindakan yang bersifat material dan keliru.
2. Adanya kesepakatan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut keliru.
3. Adanya keyakinan atau pengakuan dari pelaku atas tindakan yang salah tersebut.
4. Adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain.

2.2.3 Kategori Kecurangan

Assosiations of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok :

1. Korupsi (*corruption*)

Menurut ACFE korupsi dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*) yaitu suatu tindakan yang terjadi ketika karyawan manajer, dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu transaksi yang nantinya akan berdampak buruk pada organisasi atau instansi.
- b. Suap (*Bribery*) yaitu adalah suatu penawaran, pemberian hadiah yang diberikan kepada seseorang yang memiliki pengaruh pada saat negosiasi dan kesepakatan bisnis.
- c. Pemberian ilegal (*illegal gravity*) yaitu sebuah pemberian hadiah yang diberikan kepada seseorang yang memiliki pengaruh pada saat negosiasi dan kesepakatan bisnis.
- d. Pemerasan secara ekonomi, yang pada dasarnya pemerasan ekonomi adalah lawan dari suap.

2. Penyalahgunaan aset

Penyalahgunaan aset adalah suatu bentuk kecurangan yang dilakukan secara tidak sah dan penggelapan suatu aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri serta memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

Ada beberapa kelompok penyalahgunaan aset yaitu :

- a. Kecurangan (*cas fraud*)
Kecurangan kas yaitu pencurian terhadap kas perusahaan dan pengeluaran kas secara curang.
- b. Kecurangan Atas persediaan dan aset lainnya (*Fraud inventory and all others asset*) kecurangan atas persediaan dan aset lainnya adalah

pencurian terhadap persediaan dan aset yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)

Pernyataan palsu merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebelumnya (*under statement*) dan lebih dari sebelumnya (*under statement*) jenis jenisnya yaitu :

- 1) *Timing difference (Improper treatment of sales)* yaitu kecurangan berupa pencatatan waktu transaksi yang berbeda di laporan keuangan.
- 2) *Fictions revenues* yaitu kecurangan berupa pencatatan pendapatan fiktif di laporan keuangan
- 3) *Cancealed liabilities and expense* yaitu kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban perusahaan.
- 4) *Imroper disclosure* yaitu kecurangan yang dilakukan dengan tidak mengungkapkan laporan keuangan secara cukup dengan maksud menyembunyikan kecurangan perusahaan sehingga pemakai laporan keuangan tidak mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya.

2.3 Variabel X

2.3.1 Pengendalian Internal (X1)

2.3.2 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi dan diciptakan oleh manajemen dengan tujuan memberikan keyakinan dalam mencapai efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan (PP No. 8 tahun 2006). Pengendalian internal ialah reencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dipercaya, memperbaiki

efisiensi,serta mendorong ditatanya kebijakan manajemen (Krismanji, 2015).Muna dan Haris (2018) mengemukakan bahwa pengendalian internal sebagai suatu proses yang dirancang dan disusun oleh suatu entitas yang kemudian dilaksanakan dewam direksi, manajemen dan personel lainnya dengan bertujuan untuk meyakinkan penggunaanya dalam pencapaian tujuan berupa : keandalan pembuatan laporan keuangan,kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Ni Luh (2015) pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, sedangkan Boynton dan Johnson (2006) mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai kebijakan organisasi dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilakukan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko yang diambil untuk pencapaian tujuan organisasi.Amrizal dalam Eliza (2015) menyatakan bahwa salah satu cara dalam pencegahan kecurangan yaitu merancang suatu sistem yang telah dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai sehingga kecurangan enggan dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Menurut Ardana dan Lukman (2016) pengendalian memiliki komponen yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)
2. Penaksiran Risiko (*Risk aesment*)
3. Aktifitas pengendalian (*control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Comunication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Amrizal dalam Eliza (2015) menyatakan bahwa salah satu cara dalam pencegahan kecurangan yaitu merancang suatu sistem yang telah dilengkapi dengan pengendalin intrenal yang memadai sehingga kecurangan enggan dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

b. Fungsi Pengendalian Internal

Fungsi dari Pengendalian Internal adalah :

1. *Preventif* yaitu pengendalian untuk mencegah kesalahan kesalahan baik itu mencegah kesalahan kealahan baik itu berupa kekeliruan ataupun ketidak beresan yang sering terjadi dalam operasi suatu kegiatan.
2. *Detectiv*, yaitu untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.
3. *Corective*, yaitu untuk memperbaiki kelemahan kesalahan dan penyimpangan yang terdeteksi
4. *Directive*, yaitu untuk mengarahkan agar pelaksana dilakukan dilakukan dengan tepat dan benar
5. *Compensative*, yaitu untuk menetralsisir kelemahan pada aspek kontrol lain.

Pernyataan lain menurut SA Seksi 319 (2001) bahwa Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris manajemen serta personel lain dalam entitas tersebut yang dirancang guna menambah keyakinan tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini, yaitu, keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Namun terdapat pengertian khusus yang lebih spesifik mengenai Pengendalian Internal untuk mencegah fraud. Menurut COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) (1992) dalam Theodorus (2010) sebagai suatu sistem berisi proses dan prosedur dengan tujuan khusus yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama yaitu untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud).

Pengendalian Internal yang telah diterima di sebagian besar lingkup Amerika Serikat adalah kerangka Pengendalian Internal COSO. Terdapat lima komponen kerangka Pengendalian Internal COSO (Elder, Randal J. et al.,2012:321) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Komponen pertama yaitu lingkungan

pengendalian digambarkan sebagai payung dari keempat komponen pengendalian lainnya. Berikut adalah komponen Pengendalian Internal COSO :

1. Lingkungan Pengendalian

Pengendalian Internal yang efektif akan sangat ditentukan oleh sikap dari manajemen puncak. Apabila manajemen puncak memegang teguh prinsip bahwa pengendalian adalah hal yang sangat penting, maka pihak lain dalam organisasi tersebut akan merespon dengan melakukan tindakan sesuai pengendalian yang ditegakkan. Namun apabila manajemen puncak tidak menaruh perhatian yang lebih pada sistem pengendaliannya, maka tujuan pengendalian manajemen tidak dapat tercapai secara efektif. Lingkungan pengendalian terdiri dari kebijakan, tindakan serta prosedur yang menggambarkan sikap dari komponen puncak entitas baik manajemen, direksi maupun pemilik entitas tersebut berkaitan dengan pentingnya Pengendalian Internal dalam entitas.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses analisis dan identifikasi yang dilakukan manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan sesuai dengan PABU. Dalam hal ini, penilaian risiko yang dilakukan manajemen tentu berbeda dengan penilaian risiko oleh auditor, namun masih saling terkait. Manajemen menilai risiko sebagai bagian dari sistem perancangan dan pelaksanaan Pengendalian Internal entitas tersebut, agar kecurangan atau kesalahan dapat diminimalisir. Sementara itu, auditor menilai risiko untuk menentukan bukti audit yang dibutuhkan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian berguna untuk membantu meyakinkan manajemen bahwa telah dilakukan tindakan – tindakan pencegahan guna mengatasi risiko yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Setiap entitas tentu memiliki pengendalian yang berbeda, baik pengendalian manual maupun pengendalian otomatis. Terdapat lima aktivitas pengendalian yaitu: pemisahan tugas yang memadai, dokumentasi dan catatan yang memadai, pengecekan

terhadap pekerjaan secara independen, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, serta pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pembentukan sistem informasi dan komunikasi akuntansi oleh suatu entitas bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kegiatan operasionalnya, serta untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait.

5. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menilai aktivitas yang berjalan dan dilakukan secara berkala berkaitan dengan sistem Pengendalian Internal yang telah diterapkan manajemen, apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan atau belum. Apabila terjadi perubahan kondisi dan sistem Pengendalian Internal belum berjalan dengan baik, maka dilakukan modifikasi sistem. Informasi berkaitan aktivitas pengawasan didapatkan dari bermacam-macam sumber, seperti laporan Internal auditor, studi atas sistem pengendalian yang telah berjalan, laporan dari regulator seperti lembaga perbankan, laporan pengecualian atas aktivitas pengendalian, feed back dari karyawan, serta keluhan dari pelanggan tentang biaya penagihan.

2.3.2 Ketaatan Aturan Akuntansi (X2)

2.3.2.1 Pengertian Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Perkanida (2015) ketaatan aturan akuntansi adalah sebuah sikap patuh terhadap aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus diujalankan dan dilaksanakan serta dituruti. Didalam

suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan dan melaksanakan jalannya berbagai kegiatan di dalam instansi salah satunya adalah mengenai kegiatan akuntansi. Menurut Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan.

Dengan demikian ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya. Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor. Apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya. Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan. Dari pihak ekstern, pemakai laporan keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi (Thoyibatun, 2009). Agar menghasilkan informasi yang berkualitas maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerjayang sesuai dengan prinsip akuntansi.

Prinsip-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan (Thoyibatun, 2009).

2.3.2.2 Tujuan Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Prekanida (2015:57) ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi bertujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya.

2.3.2.3 Indikator Indikator Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Thoyibatun (2009) indikator-indikator ketaatan aturan akuntansi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penerapan

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4. Obyektifitas

Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kehati Hatian

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Konsistensi

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Secara teoritis, ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban. Sebab, jika laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor (Thoyibatun, 2009).

2.3 Perilaku Tidak Etis (X3)

2.3.1 Pengertian Perilaku Tidak Etis

Perilaku tidak etis adalah perilaku atau sikap menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi tujuan tersebut berbeda dari tujuan yang telah disepakati sebelumnya (Fitri, 2016). Jika perilaku tidak etis dibiarkan maka akan berkembang menjadi perilaku yang sangat luas yang sulit ditelusuri dan menimbulkan akibat yang merugikan (Ahriati, 2015). Perilaku tidak etis yang dimiliki individu juga akan mengarahkan individu tersebut untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.3.2 Faktor Penyebab Perilaku Tidak Etis

Shintadevi (2015) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perilaku tidak etis adalah kurangnya pengawasan manajemen di mana hal tersebut dapat memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan tindakan tidak etis yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri, ketidakpuasan dan kekecewaan karyawan dengan hasil atau kompensasi yang diperoleh di dalam suatu perusahaan atas apa yang telah mereka kerjakan. Seseorang sengaja berperilaku tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis. Tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel Penelitian Terdahulu 2.4

no	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Novikasari	2019	Pengendalian internal, moralitas, integeritas, audit internal, dan kecenderungan akuntansi (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali)	Pengendalian internal, moralitas, integeritas, audit intrnal, dan kecenderungan akuntansi memberikan dampak dan pengaruh terhadap kecenderungan akuntansi
2	Rodiyah	2019	Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan	Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Manajemen dan Budaya Organisasi berpengaruh positif

			Akuntansi	terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3	Damayanti	2016	Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi (Studi Eksperimen pada Pegawai Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY	Pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
4	Ni Luh Putu Normadewi Abdi Pradyani	2015	Pengaruh Kefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri Informasi pada Akuntabilitas Organisasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Bali)	Pertama, keefektifan pengendalian internal berpengaruh pada akuntabilitas organisasi melalui kecenderungan kecurangan akuntansi. Kedua, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas organisasi melalui kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketiga, asimetri informasi berpengaruh pada akuntabilitas organisasi melalui kecenderungan kecurangan akuntansi

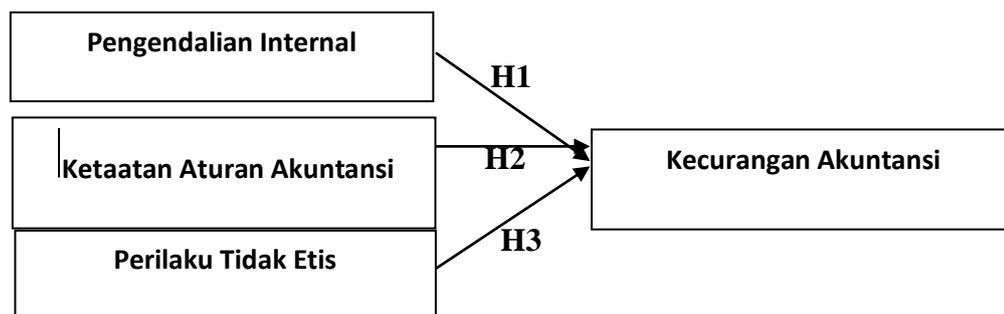
5	I MadeDarma Prawira, Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan	2014	Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, dan Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (FRAUD) Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng	Moralitas Individu dan Efektifitas Pengendalian Internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. Sedangkan Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi.
6	Nur Ratri Kusumastuti dan Wahyu Meiranto	2012	Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening	1) Pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 2) Moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Prilaku Tidak Etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah kabupaten pesawaran.

gambar 2.5

Kerangka Berfikir.



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Selain itu, pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan perusahaan. Penjagaan aktiva dan informasi yang akurat sering berjalan seiring, karena karyawan yang ingin menggelapkan aktiva atau berniat melakukan kecurangan juga perlu menutupi kecurangan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi (Karyono, 2013:96). Penelitian Wilopo (2006)

dan Monica (2012) menunjukkan bahwa semakin efektifnya pengendalian internal, maka kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dihindarkan.

Sistem pengendalian intern yang terdiri atas lima dimensi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan merupakan dasar bagi keseluruhan sistem pengendalian intern, dimana lingkungan pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang signifikan dalam kegagalan efektifitas unsur sistem pengendalian intern lainnya (Arens, 2014). Kecenderungan karyawan untuk bertindak secara tidak fungsional akan menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi menjadi tinggi, dan jika kualitas prosedur pengendalian internal juga jelek maka kesempatan karyawan untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi akan meningkat. Penelitian Thoyibatun (2009) menunjukkan bahwa dengan efektifnya pengendalian internal memberikan ketentuan mengenai prosedur untuk mendapatkan dan menggunakan kemajuan kerja, pembelian peralatan dan persediaan permintaan resmi, penggunaan fasilitas yang dimiliki dan akuntabilitas. Upaya ini berguna dalam menekan kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.6.2 Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Taatnya manajemen pada aturan akuntansi yang berlaku dalam melakukan kegiatan-kegiatan akuntansi diharapkan dapat mengurangi perilaku tidak etis. Menyatakan bahwa standar akuntansi disusun untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Thoyibatun (2009) menjelaskan bahwa ketaatan aturan akuntansi

dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang sudah ditentukan oleh BPK dan atau SAP. Sedangkan Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, dimana hal tersebut akan menimbulkan kecurangan akuntansi pada instansi yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Instansi yang menaati segala pedoman dalam mengukur dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku akan memperkecil celah pegawai dalam melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya, instansi yang tidak menaati standar akuntansi dalam mengukur dan menyajikan laporan keuangan, peluang melakukan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi (Rahmawati dalam Shintadevi, 2015). Dengan berdasarkan penelitian Wilopo (2006), Thoyibatun (2009) dan Adelin (2013) ketaatan aturan akuntansi dapat mencegah dan mengurangi tindakan. Kecenderungan kecurangan akuntansi yang berarti bahwa semakin suatu manajemen taat pada aturan akuntansi maka semakin rendah pula kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian ini maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.6.3 Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi

Griffin dan Ebert (2007:58) menyatakan bahwa perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan. Perilaku atau Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya (Ricky w griffin dan Ronald,J. Ebert, 2006). Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi

perilaku pribadi di lingkungan kerja, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya.

Perilaku tidak etis yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perilaku tidak etis dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kedudukan, dan sumber daya mendorong individu untuk melakukan kecurangan (Fitri, 2016). Penelitian Shintadevi (2015) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin seseorang berperilaku tidak etis, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut.

H3 : Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi